

SEMINAR POLITIK

**REFORMED CENTER FOR
RELIGION AND SOCIETY**

JAKARTA, 5 APRIL 2014

POLITIK YANG BERMORAL UNTUK INDONESIA 2014

FRANZ MAGNIS-SUSENO

POLITIK YANG BERMORAL

Politik mempunyai nama jelek. Berpolitik disamakan dengan rebutan kekuasaan, segala macam dagang sapi dan permainan, ladang orang dan partai mencari keuntungannya sendiri. Pandangan itu salah. Lebih dari itu. Secara tidak langsung pandangan ini merupakan *self fulfilling profecy*: kalau memang itulah makna politik, maka kalau saya sendiri korup, ya semestinya.

Tetapi politik adalah medan di mana kesejahteraan, keselamatan, keamanan, harga dan martabat bangsa diusahakan. Politik menentukan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup, berusaha, memecahkan masalah-masalah mereka. Aristoteles 2400 tahun lalu menganggap bahwa ikut berpolitik merupakan kegiatan paling luhur bagi seseorang. Hans Jonas dalam bukunya tentang tanggungjawab

yang semashyur memakai negarawan sebagai contoh orang yang langsung menyadari apa hakekat tanggungjawab; seorang negarawan 100%, siang malam memberi hati dan tenaga bagi penyelamatan bangsa dan seperlunya bahkan dituntut mengorbankan kebahagiaan keluarganya.

Karena itu politik merupakan hal tanggungjawab. Dan kesediaan untuk bertanggungjawab adalah inti sikap bermoral. Melakukan politik secara moral berarti melakukan politik secara bertanggungjawab dan bersedia dituntut pertanggungjawaban.

Bukan hanya negarawan maupun politisi yang dituntut tanggungjawabnya. Dalam demokrasi rakyat pun dituntut bertanggungjawab. Masing-masing orang dan kelompok orang, tentu sesuai kemungkinan dan kedudukannya, dituntut memperhatikan politik dan ikut berpolitik. Kita semua dipanggil –dipanggil oleh siapa? oleh Tuhan!- untuk ikut bertanggungjawab atas negara kita. Tanggungjawab itu misalnya disadari oleh tokoh-tokoh Kristiani di Indonesia sejak permulaan pergerakan nasional, mereka berpartisipasi sepenuhnya, mereka juga berpartisipasi aktif dalam perjuangan demi membela kemerdekaan dan karena mereka sejak semula diterima sepenuhnya sebagai warga bangsa Indonesia.

Dalam demokrasi menurut penulis, *golput* tidak merupakan pilihan bertanggungjawab! Jangan kita menghindar

dari melibatkan diri dalam nasib bangsa dan seakan-akan menjadi benalu menikmati hasil perhatian dan keprihatinan yang lain-lain. Dalam demokrasi warga negara wajib memberi sumbangannya agar negaranya dipimpin oleh orang-orang yang lebih baik, sekurang-kurangnya untuk mencegah jangan sampai negara kita dipimpin oleh orang yang buruk.

Berikut ini, pertama, dipaparkan lima tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang dan yang perlu ditanggulangi. Kemudian akan dicoba diperlihatkan bahwa penanggulangan tantangan-tantangan itu secara etis dapat tercapai apabila kita berpegang pada dasar etis bangsa Indonesia, pada Pancasila. Hal itu berdasarkan keyakinan bahwa Pancasila, jauh dari merupakan semacam hiasan tanpa arti praktis, merupakan senjata ampuh untuk mengatasi ancaman serta memajukan bangsa Indonesia dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia orang Indonesia.

LIMA TANTANGAN YANG DIHADAPI BANGSA INDONESIA SEKARANG

Politik, dan khususnya: etika politik yang kita butuhkan sekarang adalah politik dan etika yang dapat memberdayakan bangsa Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dialaminya sekarang. Di antara sekian tantangan ada lima yang barangkali paling mencolok:

(1) Keambrukan toleransi tradisional

Bangsa Indonesia pernah mampu hidup bersama dalam damai -meskipun tak pernah dalam damai ideal, selalu ada konflik-konflik. Kemampuan itu semakin ambruk. Konflik dan kekerasan di mana-mana: tawuran sadis pelajar tanpa sesal, perang antar kampung (rebutan narkoba), lalu di daerah antara etnik-etnik yang menjadi lebih gawat kalau identitas etnik termasuk identitas agama tertentu, penduduk aseli lawan penduduk pendatang, konflik tanah dst. Bukan disintegrasi bangsa yang menjadi ancaman, melainkan konflik dan kekerasan antar tetangga. *Money politics* dalam perpolitikan membuat pilkada mejadi pemicu kekerasan nomor satu.

(2) Budaya konsumerisme hedonistik

Konsumsi menjadi tujuan hidup. Konsumsi sebagaimana didefinisikan oleh iklan/promosi dlsb. Orang mengukur nilai hidupnya, harga diri dan identitasnya dari kemampuan untuk konsumsi, tidak untuk memenuhi kebutuhan/keinginan tertentu, melainkan konsumsi demi konsumsi. Shopping sebagai gaya hidup. Di kota lebih besar *mall-mall* menarik *the golden crowd*. Tapi orang kecil pun mau kelihatan *trendy* dan mengalami krisis identitas kalau tidak dapat membeli *gadget* paling baru. Perhatian pada mereka yang miskin, cita-cita nasional dan cita-cita menjadi orang yang berguna bagi masyarakat mati di iklim itu.

(3) Keambrukan solidaritas bangsa

40% bangsa Indonesia mengalami kemajuan terus dalam tingkat hidup dan kesejahteraan. Itu perlu disyukuri. Tetapi 60% belum sejahtera, 68 tahun sesudah proklamasi. Sekitar 30 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lain, kekayaan luar biasa bertumpuk-tumpuk. Bangsa terancam oleh perpecahan vertikal. Pemerintah pasca-reformasi belum berbuat apa pun bagi kurang lebih 48% masyarakat yang hidup dari pertanian (itu juga aneh; sudah lama diketahui betul bahwa negara seperti Korea Selatan dan Taiwan mengalami kemajuan ekonomis luar biasa karena mereka menyehatkan dulu sektor pertanian; tapi kita ini tetap feodal: petani tidak dianggap).

(4) Ekstremisme keagamaan

Intoleransi (nr. 1 di atas) yang terus bertambah "secara alami", karena tekanan hidup sehari-hari dlsb., diperkuat dan didorong oleh kelompok-kelompok agamis yang mau membongkar *Bhinneka Tunggal Ika* dan menggantikannya dengan rezim totaliter agamis menurut cita-cita impor. Ada yang meremehkan budaya tradisional, ada yang menolak paham kebangsaan, dan apabila mereka tidak lagi dapat menghayati nilai-nilai kebangsaan, mereka juga tidak lagi dapat menghayati nilai-nilai kultural serta nilai-nilai kemanusiaan. Itulah sebabnya dari mereka itu lahir mental teroris

yang bersedia membunuh. Pengaruh radikalisme justru kuat di universitas-universitas negeri, di antara para mahasiswa, para calon kelas intelektual bangsa. Bahwa negara lemah dalam melindungi minoritas-minoritas dan banci dalam melindungi apa yang dicap "ajaran sesat", amat memalukan. Bahwa orang yang tidak termasuk enam agama yang diakui negara, tidak diakui sebagai warga negara adalah buruk. Masyarakat yang masih beragama asli tidak diakui sebagai warga negara Indonesia!

(5) Korupsi

Saya menganggap korupsi sebagai ancaman terbesar yang dihadapi negara kita. Soalnya, korupsi menggerogoti substansi kebangsaan kita: Substansi moral, substansi sosial, kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Korupsi membuat kita dari atas sampai ke bawah menjadi orang yang tidak jujur. Itu fatal. Orang yang tidak jujur tidak lagi tahu apa itu keadilan. Ia tidak tahu apa arti tanggungjawab. Dan ia tidak lagi meminati mutu outputnya. Karena itu kompetensi-kompetensi yang barangkali dimiliki menjadi tidak efektif karena bukan kualitas outputnya, melainkan keuntungan pribadi yang menjadi motivasinya. Kalau kita tidak berhasil memberantas korupsi, bangsa kita akan gagal. Korupsi paling berbahaya adalah korupsi di elite politik negara kita. Ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi karena korupsi adalah malapetaka. Bagaimana demokrasi kita dapat *survive*, kalau

50% anggota DPR adalah orang kriminal yang tempatnya seharusnya di penjara?

Karena lima tantangan itu situasi di negara kita betul-betul gawat. Demokrasi hasil reformasi satu-satunya sekarang terancam dari dua sudut. Dari para mantan yang ber-seru "kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen" ("hapuskan kembali amendemen/amendemen"). Dan dari mereka yang ingin menciptakan negara yang lain, berdasarkan paham keagamaan eksklusif. Yang pertama diam seribu bahasa tentang ratusan ribu orang yang terbunuh dan jutaan saudara-saudari bangsa yang dihancurkan eksistensi ekonomis, sosial dan kulturalnya atas semboyan indah itu. Yang kedua ingin membuat Indonesia bukan lagi Indonesia.

KEMBALI KE PANCASILA

Nilai-nilai dasar, cita-cita dan norma-norma dasar etika politik bangsa Indonesia adalah Pancasila. Tantangan-tantangan yang kita hadapi harus kita tanggulangi atas dasar Pancasila. Pancasila adalah yang harus menjadi acuan akhir segala kebijakan, jadi harus betul-betul dihayati. Pancasila, itu berarti masing-masing sila, dan itu juga berarti rohnya.

Roh Pancasila adalah persatuan segenap bangsa tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, baik dalam hal agama maupun dalam hal kesukuan dan budaya. Karena Pancasila justru lahir sebagai pemecahan sebuah masalah

dasar –sebagaimana yang pertama kali dicetuskan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945,- yaitu masalah apakah Indonesia mau dijadikan negara agama atau negara nasionalis-sekuler. Jawaban yang diberikan Sukarno dan yang akhirnya mendapat bentuk definitif dalam pembukaan Undang-undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak ada diskriminasi di antara kita, dan konsensus itu mendapat kekuatan karena lima nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan cita-cita untuk diwujudkan, seperti yang terungkap dalam lima sila Pancasila dimiliki bersama. Konsensus itu dasar mengapa keanekaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke mau bersama dan bisa merupakan satu bangsa.

Tentang Pancasila terdapat salah paham, seakan-akan Pancasila sekedar nilai-nilai tradisional bangsa. Pancasila itu lebih dari itu. Negara Indonesia yang mau didirikan oleh para *founding fathers* bukan macam Majapahit atau kesultanan, melainkan negara modern yang mempunyai kedudukan di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu Pancasila hanya dimengerti betul, dan hanya "mempunyai gigi" apabila implikasi dalam etika politik pasca-tradisional tidak disingkirkan seperti dilakukan di rezim Demokrasi Terpimpin dan Orde baru. Mari kita lihat lima sila satu-satu.

Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan persis dengan maksud agar warga bangsa Indonesia dengan orientasi apa saja (bukan: "Allah", bukan "Tuhan", melainkan "Ketuhanan") sepenuhnya diakui sebagai warga negara dan manusia. Dalam bahasa kontemporer itu adalah *pengakuan terhadap kebebasan beragama*. Kebebasan beragama adalah hak asasi paling dasar etika politik modern, implikasi dalam *perjanjian perdamaian Westfalia* (1648) yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Di sini perlu ditegaskan bahwa sila ini tidak terbatas pada beberapa agama yang "diakui", misalnya pada enam agama, melainkan justru mengakui segenap orientasi religius sebagai dihormati dalam bangsa Indonesia.

Sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab* tentu memuat dua segi: Di satu segi penghormatan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Masyarakat, negara, aparat diharapkan membawa diri secara beradab. Di lain segi, pengakuan kemanusiaan memuat pengakuan martabat setiap orang sebagai manusia dan itu mengimplikasikan jaminan terhadap *hak-hak asasi manusia*. Sila kedua Pancasila menuntut hormat tanpa syarat terhadap hak-hak asasi manusia.

Persatuan Indonesia bukan pertama-tama prinsip etika politik, melainkan pengakuan bahwa bangsa Indonesia ditata dalam bentuk negara teritorial kebangsaan, yaitu dalam Republik Indonesia. Sebagai itu sila kedua mengimplikasi-

kan bahwa warga negara Indonesia mencintai bangsa dan negaranya dan bersedia berkorban baginya.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan tentunya hanya bisa berarti satu: demokrasi. 86 tahun lalu Mohammad Hatta sudah menegaskan bahwa Indonesia merdeka harus menjadi demokrasi. Sesudah puluhan tahun rezim otoriter terwujud konsensus hampir segala pihak dalam masyarakat Indonesia bahwa Indonesia betul-betul harus menjadi negara dan masyarakat demokratis. Mempertentangkan *permusyawaratan/perwakilan* dengan hak segenap warga negara Indonesia (yang mencapai umur minimum) untuk dalam pemilihan umum ikut menentukan siapa yang mewakilinya serta siapa yang memimpinya tak lain adalah manuver elit feodalistik lama yang kembali mau memegang kekuasaan di tangan mereka sendiri.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia -yang masih jauh sekali dari menjadi kenyataan- merupakan cita-cita paling penting para *founding fathers* - bersama dengan kemerdekaan. Keadilan sosial adalah tuntutan *solidaritas* sebagai kewajiban dasar suatu bangsa. Bangsa merupakan komunitas yang solider. Solidaritas dalam keluarga besar, dalam desa, dalam kelompok merupakan nilai yang sekarang pun masih kuat dihayati dalam masyarakat. Tidak bisa diterima bahwa sebagian bangsa maju terus dan menikmati ha-

sil buah pembangunan sedangkan lebih dari 100 juta saudara dan saudari sebangsa hanya nonton saja.

PERTIMBANGAN PENUTUP

Bahwa demokrasi kita bermasalah sulit disangkal. Di satu pihak ada hal-hal struktural yang belum memuaskan, misalnya kedudukan relatif lemah presiden dalam demokrasi yang dikehendaki demokrasi presidensial. Begitu juga yang menyangkut otonomi daerah. Di lain pihak korupsi yang merajalela di elite politik secara serius mengancam kredibilitas bukan hanya elite politik itu, melainkan seluruh sistem demokrasi.

Sekarang ada suara-suara yang secara nostalgia mau kembali ke zaman Suharto (lupa ratusan ribu orang mati dan jutaan orang yang dihancurkan kemanusiaannya oleh bapak yang baik itu). Ada yang mau mengamendemen amandemen-amandemen UUD 1945 mengebiri hak-hak asasi manusia dan menggantikan demokrasi dengan oligarki (entah sipil, yaitu kekuasaan di tangan ulama/pastor/pendeta (ayatullah?), entah militer [kembali ke titik nol seperti di Mesir?]). Ada yang mau menggantikan "demokrasi perorangan" dengan "demokrasi perwakilan" di mana wakil-wakil rakyat tidak ditentukan oleh rakyat sendiri.

Tentu, amendemen lagi boleh saja, bahkan barangkali perlu. Tetapi satu hal mesti jelas: apa pun yang diamen-

demen, substansi pemerintahan demokratis (pemilihan umum *one person one vote*, kewajiban pemerintah bertanggungjawabkan pemerintahannya terhadap rakyat, hak rakyat untuk menggantikan pemerintahan, kebebasan-kebebasan demokrasi [menyatakan pendapat lisan, tertulis dan elektronis, berkumpul, berserikat, membentuk partai politik) serta hak-hak asasi manusia seperti telah dimasukkan ke dalam undang-undang dasar kita sekarang tidak boleh diizinkan tersentuh. ■

